

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akomodasi perhotelan tidak dapat dipisahkan dengan pariwisata. Tanpa kegiatan kepariwisataan dapat dikatakan akomodasi perhotelan tidak akan berkembang. Sebaliknya pariwisata tanpa hotel merupakan suatu hal yang kurang lengkap, apalagi kalau kita berbicara pariwisata sebagai suatu industri. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*) (Badan Pusat Statistik: 2010). Hotel sebagai salah satu sarana akomodasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkembangan industri pariwisata, karena berfungsi sebagai tempat menginap para wisatawan yang datang selama mereka melakukan perjalanan wisata. Perkembangan industri perhotelan yang pesat telah mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat, maka akan banyak hotel-hotel mewah yang memasuki industri perhotelan dalam menarik tamu untuk menginap, maupun untuk memanfaatkan fasilitas lainnya yang tersedia di hotel.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi pariwisata yang besar dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat hunian kamar hotelnya pada saat event-event tahunan tertentu, dengan kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan, dengan pemasukan devisa serta kontribusinya terhadap PDRB yang cukup memadai. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi

Kalimantan Barat maupun wisatawan nusantara setiap tahunnya meningkat, hal ini perlu diimbangi antara lain dengan peningkatan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kamar/akomodasi tersebut.

Pada sisi yang lain, secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Barat. Melalui otonomi daerah, maka kewenangan daerah lebih besar ditekankan pada daerah tingkat II, yakni Kabupaten dan Kota. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak berbatasan langsung secara darat dengan negara tetangga Malaysia merupakan salah satu provinsi yang tengah berkembang. Perkembangan provinsi ini terus ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu fasilitasnya adalah perkembangan jumlah hotel yang terus meningkatkan pajak hotelnya. Bertambahnya jumlah hotel dari tahun ke tahun di Provinsi Kalimantan Barat membuat pajak hotel

pada provinsi ini ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Pajak hotel yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berperan bagi kelanjutan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri.

Berikut jumlah hotel yang ada di Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1.1
Jumlah Hotel Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2002-2013

Tahun	Jumlah Hotel				
	Pontianak	Singkawang	Melawi	Sintang	Landak
2002	27	12	-	3	4
2003	32	15	2	4	6
2004	35	16	3	5	8
2005	36	17	4	6	9
2006	37	18	6	7	10
2007	38	19	7	8	12
2008	39	20	8	10	14
2009	40	21	9	13	15
2010	41	22	11	16	17
2011	42	24	12	17	18
2012	43	24	14	20	19
2013	47	24	18	23	22
JUMLAH	457	232	94	132	154
\bar{X}	45,7	23,2	9,4	13,2	15,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar 2003-2014

Pajak secara umum dapat berpengaruh terhadap kehidupan serta perekonomian, begitu juga dengan pajak hotel. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*) (Suparmoko, 2002:71).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah harus memiliki sumber pendapatan untuk membiayai pengadaan berbagai macam barang publik dan program-program redistribusi pendapatan. Sumber itu adalah pajak yang dipungut dari pendapatan perorangan dan perusahaan, upah yang diterima setiap buruh, harga penjualan aneka barang konsumsi dan lain-lain. Pajak terkesan sebagai harga dalam hal ini harga yang harus kita bayarkan untuk menikmati barang-barang publik. Yakni pajak tidak bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib. Setiap orang harus tunduk pada hukum perpajakan. Kita semua berkewajiban memberikan iuran untuk menutup biaya pengadaan barang-barang umum dan barang publik.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 17 Kab/Kota yang terdiri dari 5 (lima) kota dan 12 (dua belas) kabupaten, yang mana dari masing-masing daerah mempunyai hotel berbintang maupun non bintang. Pada penelitian ini, kab/kota yang dijadikan sampel antara lain Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Landak. Kab/kota yang dipilih berdasarkan dari data tingkat hunian kamar tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk lebih jelasnya berikut tersedia data tingkat hunian kamar hotel pada 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dari tahun 2002-2013.

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Hunian Kamar Hotel Pada 5 (Lima)
Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2002 – 2013

No	Kab/Kota	Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel (%)											
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Pontianak	40,43	40,88	41,81	42,51	43,20	42,85	42,57	41,03	42,14	47,77	49,57	51,02
2	Kota Singkawang	33,96	39,84	40,01	42,25	40,22	38,48	38,54	43,00	42,42	42,96	43,17	43,19
3	Kabupaten Melawi		17,96	20,78	25,42	35,99	30,06	31,47	25,28	27,49	26,35	26,48	26,81
4	Kabupaten Sintang	14,46	15,62	15,43	18,33	22,76	27,62	28,56	28,60	29,09	34,86	48,18	47,91
5	Kabupaten Landak	11,93	12,56	14,37	15,51	19,55	27,54	28,71	28,96	29,76	30,46	30,77	31,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar Tahun 2003-2014

Jika dilihat pada Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa dalam 7 (tujuh) tahun terakhir tingkat hunian kamar hotel pada 5 (lima) kab/kota di Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya karena meningkatnya sektor pariwisata di kab/kota tersebut, yang mana salah satunya didukung oleh peran serta pemerintah daerah masing-masing yang mengembangkan potensi tempat wisata didaerahnya untuk menarik para investor.

Pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari wisata alam dan wisata budaya. Salah satu wisata yang dapat kita temukan adalah Tugu Khatulistiwa yang terletak di ibu kota provinsi, yaitu Kota Pontianak. Adanya peristiwa alam yang terjadi setahun hanya sekali di Tugu

Khatulistiwa, yaitu titik kulminasi matahari membuat kota Pontianak selalu dikunjungi setiap tahunnya oleh wisatawan. Selain itu, wisata alam lainnya berupa pegunungan, pantai, pulau-pulau serta air terjun yang ada di kota Singkawang menjadikan daerah tersebut dijadikan tujuan rekreasi yang selalu ramai dikunjungi.

Dampak langsung yang dapat dirasakan dari meningkatnya sektor pariwisata adalah meningkatnya tingkat hunian hotel sebagai akibat dari membludaknya jumlah wisatawan yang datang. Meningkatnya jumlah pengunjung ini dapat dilihat pada event-event tertentu, seperti pada saat perayaan tahun baru, titik kulminasi matahari, perayaan hari besar agama seperti capgomeh dan imlek. Khususnya pada kota Pontianak dan kota Singkawang.

Pada awalnya tingkat hunian kamar tertinggi di Kalimantan Barat diduduki oleh Kota Pontianak, namun pada beberapa tahun belakangan ini dilihat dari data diatas telah terjadi penurunan tingkat hunian dikarenakan adanya tempat wisata baru selain di Kota Pontianak, yang menyebabkan pengunjung beralih ke tempat wisata di daerah lain yaitu Kota Singkawang. Kota Singkawang kini berada satu tingkat diatas Kota Pontianak di dalam jumlah tingkat hunian kamar hotel. Letaknya yang berada di pesisir pantai dan dikelilingi oleh gunung-gunung memberikan kesan dan keindahan tersendiri bagi pengunjung Kota Singkawang ini, disamping juga peran pemerintah yang selalu berusaha untuk meningkatkan sektor kepariwisataannya. Sebagai kota tujuan wisata di Kalimantan Barat, Kota

Singkawang memiliki berbagai sarana penunjang untuk memberikan kemudahan kepada para wisatawan yang datang. Setelah itu baru disusul 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu kabupaten Melawi, kabupaten Sintang dan kabupaten Landak.

Kota Pontianak dan Kota Singkawang, jumlah tingkat hunian kamar hotel didapat dari 2 (dua) jenis data yang berbeda, yaitu Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Tingkat Hunian Hotel Non Bintang. Sedangkan pada Kabupaten hanya ada tingkat hunian kamar hotel non bintang dan usaha akomodasi lainnya saja.

Setelah melihat data tingkat hunian kamar hotel, selanjutnya kita melihat perkembangan realisasi pajak hotel pada 5 (lima) kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2002-2013.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel Pada 5 (Lima) Kab/Kota Di
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2002 – 2013

Tahun	(Rp)				
	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kabupaten Melawi	Kabupaten Sintang	Kabupaten Landak
2002	2.256.559.945	37.847.000	-	80.885.913	1.010.789
2003	2.330.791.111	64.191.779	11.385.291	98.220.117	1.212.800
2004	2.429.367.925	65.190.651	14.972.520	109.536.780	1.873.450
2005	2.480.160.337	94.015.589	20.834.725	102.032.100	2.900.118
2006	2.907.857.503	106.277.450	25.679.701	140.589.175	5.910.113
2007	3.489.272.565	77.684.244	19.792.136	179.713.479	9.870.225
2008	4.275.808.116	131.335.450	16.969.500	236.958.690	13.310.198
2009	5.173.647.587	172.457.300	32.355.500	209.016.612	11.780.665
2010	7.585.863.781	208.012.873	56.265.960	158.165.527	15.125.772
2011	10.380.899.200	244.211.106	50.156.000	238.534.870	34.464.200
2012	12.276.548.006	305.182.960	89.564.172	257.081.662	69.668.400
2013	14.838.614.339	345.788.275	105.303.130	290.715.030	101.444.300

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar Tahun 2003-2014

Berdasarkan pada Tabel 1.3, terlihat pajak hotel di Provinsi Kalimantan Barat semakin tahun mengalami peningkatan. Terutama pada Kota Pontianak yang mengalami peningkatan yang sangat drastis dibandingkan Kota Singkawang dan 3 (tiga) kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah pengunjung yang datang terus menerus serta diiringi meningkatnya fasilitas-fasilitas penunjang sarana hotel.

Berikut rata-rata hitung (\bar{x}) dari realisasi pajak hotel pada tabel 1.3 :

Dengan menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 \dots + x_n}{n}$$

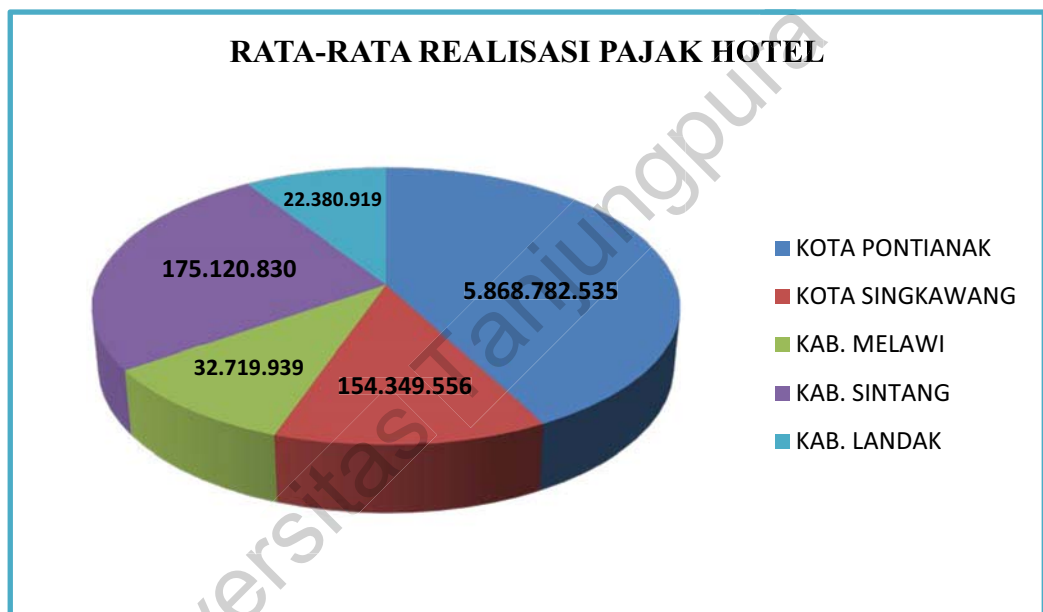
Ket:

\bar{x} = rata – rata hitung

x_i = nilai sampel ke – i

n = jumlah sampel

Grafik 1
Rata-Rata Hitung Realisasi Pajak Hotel Pada 5 (Lima)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat



Berdasarkan gambar grafik 1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi pajak hotel di Pontianak sangat besar di bandingkan dengan Kota singkawang dan 3 (tiga) Kabupaten yang lainnya, yaitu Kab. Melawi, Kab. Sintang dan Kab. Landak.

Dengan tingkat hunian kamar hotel yang semakin lama mengalami peningkatan begitu juga dengan pajak hotel yang semakin tahun bertambah jumlahnya, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis yang berkenaan

dengan penerimaan pajak hotel di provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari tingkat hunian kamar hotel yang ada di provinsi tersebut.

Berdasarkan kepada uraian telah dikemukakan dan menyadari adanya hubungan antara tingkat hunian kamar hotel dengan besarnya pajak hotel, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul :

“Potensi pajak tingkat hunian kamar hotel pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat perkembangan tingkat hunian kamar hotel pada 5 (lima) kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat semakin tahun mengalami peningkatan begitu juga dengan jumlah pajak hotelnya. Maka penulis merumuskan masalahnya yaitu **“Bagaimana potensi pajak tingkat hunian kamar hotel pada 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa potensi pajak tingkat hunian kamar hotel pada 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Dinas Pendapatan Kalimantan Barat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak Dinas Pendapatan Kalimantan Barat dalam menyusun kebijakan yang efektif dan efisien dalam penerimaan pajak hotel di Kalimantan Barat.

b. Bagi Pemilik Hotel

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemilik hotel yang ada di Kalimantan Barat sebagai bahan pertimbangan mereka dalam mengelola pajak hotelnya pada masa yang akan datang.